

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara Indonesia yaitu kelemahan dalam desain penyusunan pelaporan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan, penyimpangan keuangan negara yang kacau, tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara secara signifikan, pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. Sehingga, menyebabkan menurunnya kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pemerintah di era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh yaitu dengan menyusun peraturan mengenai Undang Undang keuangan diantaranya adalah yang tertera dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hal yang sangat identik dalam pertanggung jawaban pemerintah adalah laporan keuangan. *Bastian, (2010)* menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang telah memberikan amanah kepada pemerintah dalam hal ini pihak tersebut adalah masyarakat pada umumnya. Dalam mengelola laporan keuangan,

pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai yang tertera dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah direvisi yaitu Undang Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang Undang tersebut pemerintah telah merevisi tentang bagaimana kebijakan kebijakan dan peraturan yang akan dilaksanakan dalam pemerintah daerah dengan ini setiap pemerintah daerah harus mematuhi dan menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan.

Reformasi akuntansi pemerintah daerah adalah dengan membawa harapan akan terciptanya *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, hal itu dapat terbentuk dengan menciptakan sistem pemerintah yang lebih berimbang diantara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Adanya partisipasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman akan akuntabilitas publik dan otonomi daerah. Dalam sistem pengaturan keuangan daerah terdapat tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan dalam memperoleh suatu informasi. Partisipasi dimana masyarakat ikut andil dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan pusat maupun daerah. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban

kepada publik atas aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri (Harlinda, 2016).

Semua proses dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan ilmu akuntansi seharusnya dilakukan pada awal kegiatan agar bisa dilakukan analisis untuk melakukan pengawasan yang berlangsung secara terus menerus (Panca, Noer. 2017). Tujuan utama reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh para aparatur negara berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan suatu aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah tingkat pusat maupun daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun laporan keuangan pemerintah daerah harus telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dari berlakunya hal tersebut adalah supaya lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh pada faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula hal tersebut terlepas dari beberapa dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi pemerintah daerah.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada masanya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif yang sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian opini atau pendapatnya yang sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang dapat dikatakan berkualitas. Laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang cukup memadai yaitu relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai dan dibandingkan serta dipahami. Keempat kriteria kualitatif tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah.

Hasil dari pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini berikut merupakan tren opini BPK terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan:

Tabel 1.1
Tren Opini BPK
Tren Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Bangkalan 2010 - 2018

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Audit								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kabupaten Bangkalan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
www.bpk.go.id										

Sumber : IHPS Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2010-2018

Fenomena yang terjadi dalam pemerintah daerah yang berada di Jawa timur khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bangkalan pada tahun 2017 dan 2018 telah kembali berhasil mendapatkan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, BPK masih menemukan sejumlah temuan yang setiap tahunnya selalu dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yaitu permasalahan atas pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar 7,8 M diantaranya sejumlah temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 8.030 (51%) senilai 6.608 M permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan sebesar 204 (1%) atau senilai 1.04 M (*lhps pemerintah daerah kabupaten bangkalan tahun 2014-2018*). Hal ini masih saja berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan yang membuktikan bahwa tahun sebelumnya pemerintah kabupaten bangkalan tiga tahun berturut turut memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan masih belum memenuhi kriteria syarat kualitas laporan keuangan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang undangan yang berlaku pada pemerintah daerah tersebut . maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus melihat dan mengoreksi berbagai aspek tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tingkat kerugian dan kualitas laporan keuangan.

Pemerintah harus mengevaluasi setiap capaian dan penurunan yang terjadi dalam organisasinya agar laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas,

transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus mematuhi peraturan perundang undangan serta dapat mengatasi lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan dengan hal ini pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah (Yusrawati, dan Dewi Andini. 2015).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai serta berkompeten dibidangnya dalam menyusun dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dalam pemerintahan secara independen, transparan dan akuntabel. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dari itu dibutuhkan SDM yang berkompetensi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai SDM dan Pengendalian Internal yang baik supaya tercapailah pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk bisa menerapkan sistem akuntansi yang ada. SDM tersebut akan mampu dalam memahami logika akuntansi dengan baik dibandingkan dengan SDM yang memang tidak berada dalam bidang akuntansi dikarenakan hal tersebut akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Warisno, 2008).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk suatu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai

dengan kebutuhan pemakainya. Pengambilan suatu keputusan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan suatu keputusan. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hubungan teoritis tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan ada pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantara nya adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang memadai. Dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat diperlukan supaya Laporan Keuangan yang dihasilkannya dapat memenuhi karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang berlaku dalam SAP. Laporan Keuangan merupakan *output* data yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi sehingga, untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas maka hal tersebut akan membutuhkan orang orang yang berkompeten didalamnya supaya tidak ada kesalahan serta pemahaman yang kurang dalam menyusun suatu Laporan Keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Herawati, Tuti (2014), Muda, Iskandar (2017), Harlinda, (2016), Fitri, Dina (2016) yang menghasilkan sebuah penelitian dimana didalamnya menerangkan bahwa Kompetensi Sumber

Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Namun, menurut Imelda Latdjandu dalam penelitiannya Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah di kabupaten kepulauan Talaud Timangon menemukan bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena Sumber Daya Manusia tidak hanya diukur dari banyak nya sertifikasi bukti kompetensi berbagai pegawai atau SDM melainkan dengan Pengalaman (*Softskill*) yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri apakah bisa menunjang terhadap kinerjanya atau tidak. Hal ini mengakibatkan Kompetensi SDM saja tidak cukup untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang integral terhadap tindakan serta kagiatan kegiatan apa saja yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin hingga seluruh karyawan atau pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, pengamanan asset Negara, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila dalam sistem pengendalian internal ini tidak dikelola dan diterapkan dengan baik maka kemungkinan akan terjadi kesalahan, ketidakakuratan bahkan terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan organisasi menjadi sangat besar kemungkinannya. Dalam penerapan sistem pengendalian internal yang efektif hal ini akan melindungi serta meminimalisir suatu organisasi maupun pemerintahan dari berbagai kelemahan manusia, mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang akan terjadi. Sehingga, informasi yang dihasilkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan serta akan

meningkatkan kepercayaan terhadap *Stakeholder*. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian dari Syarifuddin, (2014), Herawati, Tuti (2014), Nuryanto, M (2013), Darwanis, (2009) yang mana dalam Sistem Pengendalian Internal pemerintah akan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, menjamin keandalan suatu laporan keuangan serta memfasilitasi efesiensi dan efektivitas operasi operasi pemerintahan, sehingga dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal ini akan mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakterandalan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan sistem sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Menurut Fitri, Dina (2016), mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan sistem pengendalian internal (SPI) yang baik apabila tidak diterapkan dengan benar, efektif dan efisien akan menimbulkan banyak ketidaksesuaian antara proses yang berjalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan Akbar, (2014) yang menemukan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk dapat memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sangat penting dikarenakan rendahnya pengetahuan serta pemahaman pegawai terhadap SAP yang mengakibatkan pegawai tersebut tidak memahami tentang tugas dan fungsi beserta hambatan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan laporan keuangan hal ini akan memperlambat penyajian laporan keuangan atau bahkan mengakibatkan kesalahan input yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat itu juga. Maka, hal ini diperlukan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku secara umum dalam pemerintahan supaya dapat dikelola dengan baik dan benar. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Indriasari (2008), Yuliani, (2013), Juwita, Rukmi (2014), Harlinda, (2016), Mahaputra, I Putu Upabaya Rama (2014) telah membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Teknologi Informasi didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan rupa untuk menangkap, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, menampilkan dan menyebarkan informasi. Informasi akuntansi diperlukan dalam membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang kemudian dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini terjadi. Dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik dibutuhkan informasi akuntansi yaitu salah satunya dengan melihat laporan keuangan pemerintah. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kemajuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang sedang

berkembang pesat disaat ini apalagi dalam organisasi pemerintah daerah khususnya guna membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan organisasi pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut mencakup adanya 1.) Pengolahan data, Pengolahan Informasi, Sistem Manajemen dan Proses kerja secara elektronik dan 2.) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Penelitian terdahulu oleh Harlinda, (2016), Nuryanto, (2013), Muda, Iskandar (2017) membuktikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena dengan Teknologi Informasi maka dengan mudah dalam suatu organisasi ataupun pemerintah memprediksi serta mengambil keputusan yang tepat dan akurat dengan melihat perbandingan laporan keuangan pada saat ini maupun yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas motivasi peneliti adalah untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembenahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Berdasarkan pemikiran diatas maka sangat penting meneliti tentang “ **Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan)**” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan konseptual pengembangan dalam akuntansi sektor publik. Adapun manfaat lainnya merupakan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam teori pembelajaran faktor apa saja yang terkait dalam kualitas penyusunan laporan keuangan dan menyajikan tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern Pemerintah, standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan terhadap pemerintahan dalam memberikan lebih banyak lagi kontribusi dan penanganan terkait kualitas penyusunan laporan keuangan dalam pemerintahan secara menyeluruh.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam sistem keuangan daerah serta implementasi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui dan memahami bahwa kualitas laporan keuangan dapat diengaruhi oleh beberapa faktor yang berda dalam lingkungan sehari hari yakni kompetensi sumber daya manusia nya, pemahaman akan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, bagaimana pemanfaatan teknologi nya dan sistem pengendalian intern pemerintah yang dikembangkan yang mempengaruhi segala aktivitas tersebut diatas dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah.